

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam membentuk masyarakat yang terdidik, terinformasi, dan berkualitas. Secara kualitatif, pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran. Pendidikan yang berkualitas memainkan peran penting dalam membentuk karakter, moralitas, dan etika individu, yang pada gilirannya menciptakan masyarakat yang lebih beradab.

Program pendidikan yang baik tidak hanya mencakup pendidikan formal di lembaga pendidikan, tetapi juga pendidikan nonformal dan informal. Pendidikan nonformal yang dijelaskan dalam UU No 20 Tahun 2003 sebagai berikut : a) **Fungsi pendidikan luar sekolah sebagai substitusi pendidikan sekolah.** Substitusi atau pengganti di sini mengandung makna bahwa pendidikan luar sekolah sepenuhnya menggantikan pendidikan sekolah bagi peserta didik yang karena berbagai alasan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah. Materi pelajaran yang diberikan adalah sama seperti yang diberikan di pendidikan sekolah. Contohnya adalah pendidikan kesetaraan, seperti Paket A setara dengan SD yang disajikan untuk anak usia 7 – 12 tahun yang tidak memiliki kesempatan masuk SD. Paket B setara dengan SLTP bagi anak usia 13 – 15 tahun, dan Paket C setara SMU bagi remaja usia SMU. Setelah peserta didik menamatkan studinya dan lulus ujian akhir, mereka memperoleh ijazah yang setara (SD, SLTP, atau SMU). b) **Fungsi pendidikan luar sekolah sebagai komlemen pendidikan sekolah.** Komplemen berarti pelengkap. Pendidikan luar sekolah sebagai komplemen adalah pendidikan yang meterinya

melengkapi apa yang diperoleh di bangku sekolah. Mengapa materi pendidikan di sekolah masih harus dilengkapi. Pertama, karena tidak semua hal yang dibutuhkan peserta didik dalam menempuh perkembangan fisik dan psikisnya dapat dituangkan dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian jalur pendidikan luar sekolah merupakan wahana paling tepat untuk mengisi kebutuhan mereka. Kedua, memang ada kegiatan-kegiatan atau pengalaman belajar tertentu yang tidak biasa diajarkan di sekolah, seperti misalnya olah raga prestasi, belajar bahasa asing di SD, dan sebagainya. Untuk pemenuhan kebutuhan belajar macam itu pendidikan luar sekolah merupakan saluran yang tepat. Bentuk-bentuk pendidikan luar sekolah yang berfungsi sebagai komplemen pendidikan sekolah dapat berupa kegiatan yang dilakukan di sekolah, seperti kegiatan ekstra kulikuler (pramuka, latihan drama, seni suara). Atau kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Kegiatan terakhir ini dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat dalam bentuk berbagai kursus, kelompok belajar, dan sebagainya. c)

#### **Fungsi pendidikan luar sekolah sebagai suplemen pendidikan sekolah.**

Pendidikan luar sekolah sebagai suplemen berarti kegiatan pendidikan yang materinya memberikan tambahan terhadap materi yang dipelajari di sekolah. Sasaran populasi pendidikan luar sekolah sebagai suplemen adalah anak-anak, remaja, pemuda, atau orang dewasa, yang telah menyesuaikan jenjang pendidikan sekolah tertentu (SD sampai dengan perguruan tinggi). Mengapa mereka membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap tertentu sebagai tambahan pendidikan yang diperoleh di sekolah? Pertama, perkembangan ilmu dan teknologi berlangsung sangat cepat, sehingga kurikulum sekolah sering ketinggalan. Oleh karena itu lulusan pendidikan sekolah perlu menyesuaikan

pengetahuan dan keterampilannya dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang terus berkembang. Hal itu dilakukan melalui wahana pendidikan luar sekolah. Kedua, pada umumnya lulusan pendidikan sekolah belum sepenuhnya siap terjun ke dunia kerja. Maka untuk itu lulusan tersebut perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diminta oleh dunia kerja, melalui pendidikan luar sekolah. Ketiga, proses belajar itu sendiri berlangsung seumur hidup. Walaupun telah menamatkan pendidikan sekolah samapai jenjang tertinggi, seseorang masih perlu belajar untuk tetap menyelaraskan hidupnya dengan perkembangan dan tuntutan lingkungannya.

Pendidikan juga berperan sebagai alat pemecahan masalah dan pengentasan kemiskinan. Masyarakat yang terdidik memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, membuka usaha sendiri, dan meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi.

Pendidikan, dalam segala bentuknya, dianggap sebagai pilar utama dalam membangun dan mengembangkan suatu bangsa. Lebih dari sekadar kewajiban pemerintah, pendidikan melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengelola serta menyokong sistem pendidikan yang ada. Keyakinan akan pentingnya pendidikan berkualitas telah menjadi landasan yang tak terbantahkan dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan terampil (Ulumudin & Martono, 2018). Hal ini menjadi semakin penting di era globalisasi, di mana tantangan yang dihadapi semakin kompleks dan beragam.

Pendidikan yang berkualitas bukan hanya mengacu pada akuisisi pengetahuan semata, tetapi juga pada pengembangan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi dinamika global. Masyarakat memainkan peran penting dalam mengupayakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman (Sulistriani, 2021). Hal ini mencakup pengawasan terhadap kebijakan pendidikan, dukungan terhadap lembaga-lembaga pendidikan, serta partisipasi aktif dalam proses belajar mengajar.

Dalam konteks ini, pentingnya kebijakan pendidikan yang efektif dan inklusif menjadi sorotan utama. Kebijakan pendidikan yang efektif berfokus pada hasil yang diinginkan dari sistem pendidikan. Hal ini termasuk standar-standar akademik yang tinggi, kurikulum yang relevan, metode pengajaran inovatif, serta penilaian yang objektif terhadap prestasi siswa. Selain itu, pendekatan inklusif dalam pendidikan menegaskan bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dan manfaat dari sistem pendidikan. Dalam hal ini, tidak hanya kepentingan mayoritas yang diperhatikan, tetapi juga kepentingan minoritas, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan pendidikan ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Misalnya, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan, pengawasan terhadap kualitas pendidikan yang diselenggarakan, serta menyediakan dukungan kepada siswa, guru, dan lembaga pendidikan (Chalid, 2016). Pemerintah perlu memfasilitasi keterlibatan ini dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Di tengah dinamika perubahan global, peran pendidikan menjadi semakin krusial dalam menyiapkan generasi mendatang. Dengan keterlibatan aktif dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, upaya bersama untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, efektif, dan inklusif menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Masyarakat yang cerdas, kreatif, dan terampil akan menjadi fondasi yang kokoh bagi kemajuan suatu bangsa dalam era globalisasi.

Peraturan Bupati (Perbup) No 50 Tahun 2022 di Kabupaten Gresik menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem pendidikan di daerah tersebut. Perbup tersebut menegaskan komitmen untuk mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun melalui Program Paket C (Gurupenyemangat, 2021). Keberadaan Program Paket C ini memberikan kesempatan signifikan bagi masyarakat yang mungkin terkendala dalam menyelesaikan pendidikan formalnya.

Program Paket C sebagaimana Perbup tersebut menggarisbawahi pentingnya pendidikan setinggi mungkin bagi semua individu di Kabupaten Gresik. Tujuannya tidak hanya memberikan akses, tetapi juga menekankan pada kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing individu (Wicaksono & Siska, 2020). Sebagian besar masyarakat menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi diantaranya seperti keterbatasan ekonomi, masalah keluarga yang disebabkan kondisi keluarga yang kurang harmonis atau faktor personal/individu seperti malas dalam mengikuti pembelajaran di pendidikan formal. Padahal kita ketahui bahwa pada saat ini dalam melakukan peningkatan karir, pernikahan, dan lain sebagainya memerlukan ijazah sebagai bentuk persyaratannya. Program Paket C hadir sebagai solusi untuk memberikan

kesempatan kepada mereka yang terhambat untuk tetap dapat mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan.

Dalam rangka untuk mengakomodasi beragam kebutuhan tersebut Program Paket C menjadi saluran yang penting dalam memastikan inklusivitas dalam sistem pendidikan. Hal ini sejalan dengan semangat kesetaraan akses pendidikan bagi semua tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi pribadi (Siswanto, 2017). Dalam konteks ini, Program Paket C memberikan alternatif bagi mereka yang ingin meningkatkan tingkat pendidikan mereka, meskipun telah melewati kesempatan pada masa-masa pendidikan formal.

Tidak hanya memberikan akses, Program Paket C juga memberikan dukungan yang diperlukan kepada peserta agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Hal ini termasuk pengembangan kurikulum yang relevan, penyediaan sumber daya pembelajaran yang memadai, dan bantuan pendukung dari para pendidik (Barmawi & Suranto, 2016). Dengan demikian, Program Paket C tidak hanya berfokus pada memberikan kesempatan pendidikan tambahan, tetapi juga memastikan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Perbup No 50 Tahun 2022 merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakatnya. Melalui Program Paket C, pemerintah membuktikan kepedulian mereka terhadap individu-individu yang membutuhkan akses pendidikan tambahan. Dengan demikian, diharapkan bahwa Program Paket C ini akan menjadi landasan bagi masyarakat untuk terus berkembang, meningkatkan keterampilan,

dan mengakses peluang yang lebih luas di masa depan (Margiyanti & Maulia, 2023).

**Tabel 1.1 : Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)  
Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gresik, 2020 dan 2021**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Educational Level</b>	<b>Angka Partisipasi Murni (APM) 2020</b>	<b>Net Participation Rates (NPR) 2020</b>	<b>Angka Partisipasi Murni (APM) 2021</b>	<b>Net Participation Rates (NPR) 2021</b>
SD/MI	Elementary School	98.82	107.41	99.37	109.05
SMP/MTs	Junior High School	83.29	90.51	83.91	88.84
SMA/SMK/MA	Senior High School	79.71	101.06	80.48	107.2

Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

*Catatan: APM diukur dalam persentase, sedangkan APK diukur dalam per 100 penduduk usia sekolah.*

Tabel di atas memberikan data Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Gresik untuk tahun 2020 dan 2021. Berikut adalah terjemahan dan penjelasan singkat dari tabel

tersebut: Tabel ini memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten Gresik untuk tahun 2020 dan 2021 pada berbagai jenjang pendidikan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Gresik menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan keterlaksanaan Program Wajib Belajar di Kabupaten Gresik terutama di Pulau Bawean yang terdiri dari 2 (Dua) Kecamatan yaitu: Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak diantaranya adalah masih banyaknya warga masyarakat di Pulau Bawean yang masih belum memiliki ijazah SMA di usia 16-40 tahun. Hal ini sesuai dengan data awal yang diperoleh pada saat identifikasi warga belajar sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Data Awal Peserta Didik Program Paket

<b>Data Awal</b>							
<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Program Paket</b>					
		<b>Paket A (setara SD)</b>		<b>Paket B (setara SMP)</b>		<b>Paket C (setara SMA)</b>	
		<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L</b>	<b>P</b>
<b>1</b>	<b>Tambak</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>82</b>	<b>56</b>
<b>2</b>	<b>Sangkapura</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>75</b>	<b>84</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>56</b>	<b>157</b>	<b>140</b>
	Jumlah total	<b>19</b>		<b>136</b>		<b>297</b>	
	<b>Jumlah Total Keseluruhan</b>	<b>451</b>					



Data awal pada tabel 1.1 memberikan gambaran tentang jumlah peserta didik yang terlibat dalam Program Paket di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Program kesetaraan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA). Dari data tersebut, terlihat bahwa Kecamatan Tambak memiliki jumlah peserta didik yang lebih tinggi dalam setiap kategori Paket A, B, dan C dibandingkan dengan Kecamatan Sangkapura.

Secara khusus, pada Paket A Kecamatan Tambak memiliki 15 peserta didik, sedangkan Kecamatan Sangkapura hanya memiliki 4 peserta didik. Hal serupa terjadi pada Paket B, di mana Kecamatan Tambak memiliki 84 peserta didik, sedangkan Kecamatan Sangkapura hanya memiliki 52 peserta didik. Namun, pada Paket C, Kecamatan Tambak memiliki 138 peserta didik, sedangkan Kecamatan Sangkapura memiliki 154 peserta didik.

Jika dilihat secara keseluruhan, jumlah total peserta didik di Kecamatan Tambak mencapai 14 untuk Paket A, 84 untuk Paket B, dan 138 untuk Paket C. Sedangkan di Kecamatan Sangkapura, jumlah total peserta didik adalah 4 untuk Paket A, 52 untuk Paket B, dan 159 untuk Paket C. Total keseluruhan peserta didik dari kedua kecamatan mencapai 451 peserta didik.

Kesempatan Wajib Belajar 12 Tahun yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal tersebut perlu

dibuktikan melalui evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mendalam untuk menganalisis keberhasilan Perbup No 50 Tahun 2022 dalam mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun, khususnya melalui implementasi Program Paket C di Pulau Bawean Kabupaten Gresik.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci dalam keberhasilan atau kegagalan implementasi Program Paket C. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah, pihak terkait, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan di Kabupaten Gresik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pendidikan yang inklusif dan berdaya saing di tingkat lokal.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Dalam mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan Perbup No 50 Tahun 2022 terhadap Wajib Belajar 12 Tahun melalui Program Paket C di Pulau Bawean dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Perbup No 50 Tahun 2022 di Pulau Bawean ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Perbup No 50 tahun 2022 dalam mendukung Wajib Belajar 12 Tahun?
3. Bagaimanakah tingkat keberhasilan Perbup No 50 Tahun 2022 dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan Perbup No 50 Tahun 2022 terhadap Wajib Belajar 12 Tahun melalui Program Paket C di Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura. Secara khusus, tujuan penelitian ini mencakup:

1. Mendeskripsikan Implementasi Perbup No 50 di Pulau Bawean
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Perbup No 50 Tahun 2022
3. Menilai tingkat keberhasilan Perbup No 50 Tahun 2022 dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, antara lain:

- 1.4.1 Pemerintah Kabupaten Gresik: Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang lebih efektif.

Penelitian ini memberikan pemerintah Kabupaten Gresik landasan evaluatif yang kuat terkait dengan keberhasilan implementasi Perbup No 50 Tahun 2022. Dengan menganalisis data hasil penelitian, pemerintah dapat memahami sejauh mana Program Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah telah mencapai tujuan Wajib Belajar 12 Tahun. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dan memberikan pandangan mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya. Informasi ini dapat membantu pemerintah Kabupaten

Gresik dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

#### 1.4.2 Masyarakat Pulau Bawean: Sebagai informasi yang dapat meningkatkan pemahaman mengenai Program Paket C dan Wajib Belajar 12 Tahun.

Manfaat penelitian ini terbatas pada lingkungan pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat disampaikan kepada masyarakat secara transparan dan dapat diakses dengan mudah. Hal ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

1. Implementasi Perbup No 50 di Pulau Bawean
2. faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Perbup No 50 Tahun 2022
3. Tingkat keberhasilan Perbup No 50 Tahun 2022 dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun

Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam mendukung dan melibatkan diri dalam implementasi kebijakan pendidikan.

1. Akademisi: Sebagai tambahan literatur dan pengetahuan dalam bidang pendidikan dan kebijakan publik.

Bagi peneliti dan akademisi, hasil penelitian ini akan menjadi kontribusi berharga dalam pengembangan literatur dan pengetahuan di bidang pendidikan dan kebijakan publik. Analisis mendalam terhadap implementasi Program Paket C di Pulau Bawean ini akan bermanfaat seperti berikut ini :

- a. Dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kebijakan pendidikan di tingkat lokal.
- b. Dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan
- c. Memberikan landasan untuk perbandingan dengan penelitian sejenis
- d. Serta mendukung pengembangan teori atau model yang relevan dalam konteks kebijakan pendidikan.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap perkembangan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang ini.

## **1.5 Definisi Istilah**

Untuk memperjelas pemahaman, beberapa istilah dalam penelitian ini perlu didefinisikan secara operasional:

### **1. Tingkat Keberhasilan**

Definisi operasional tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan merujuk pada cara konkret dan terukur untuk mengukur sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai tujuannya. Definisi ini memberikan panduan yang jelas tentang parameter atau indikator yang digunakan untuk menilai kinerja kebijakan tersebut. Dengan definisi operasional yang baik, dapat diidentifikasi metode pengukuran yang spesifik dan dapat diimplementasikan secara praktis.

### **2. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022**

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Program Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah di Pulau Bawean Pulau Bawean Kabupaten

Gresik menandai upaya serius pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan pendidikan kesetaraan di wilayah tersebut. Tujuan utama dari program ini adalah mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta menyediakan layanan pendidikan melalui paket tuntaskan putus sekolah

### 3. Wajib Belajar 12 Tahun

Kewajiban setiap anak untuk menjalani pendidikan formal selama 12 tahun, sesuai dengan kebijakan pemerintah Permen Dikbud No 19 Tahun 2016. Wajib belajar 12 tahun adalah kebijakan pendidikan yang mensyaratkan setiap individu untuk mengikuti dan menyelesaikan minimal 12 tahun pendidikan formal. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dengan menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang memadai hingga tingkat pendidikan menengah atas atau setara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi dan keterampilan masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara.

### 4. Program Paket C

Program Paket C menjadi solusi pendidikan nonformal yang strategis dengan tujuan utama memberikan kesempatan kepada individu yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal di tingkat SMP atau

SMA. Pada dasarnya, program ini bertujuan menciptakan kesetaraan pengetahuan dan keterampilan sejajar dengan pendidikan formal di tingkat SMP atau SMA. Dengan demikian, peserta didik Program Paket C tidak hanya mendapatkan pengetahuan esensial tetapi juga memperoleh keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain memberikan kesetaraan pendidikan formal, tujuan Program Paket C juga merambah aspek kehidupan yang lebih luas. Program ini berupaya membekali peserta didik dengan kecakapan hidup yang berharga, termasuk keterampilan untuk mencari nafkah atau mengembangkan usaha secara mandiri. Ini memberikan kontribusi positif terhadap kemandirian ekonomi peserta didik, mengurangi ketergantungan pada pekerjaan yang hanya membutuhkan pendidikan formal tertentu.

#### 5. Pulau Bawean

Pulau Bawean terletak sekitar 120 kilometer dari pusat Kabupaten Gresik, bisa dibayangkan pulau ini merupakan pulau terluar dari Kota Santri. Pulau ini memiliki dua kecamatan, yakni Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Mayoritas penduduk di pulau ini berasal dari Suku Bawean. Penduduknya berjumlah sekitar 107.000 jiwa dengan mayoritas suku Bawean serta perpaduan beberapa suku dari Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra yang turut mempengaruhi budaya dan bahasanya. Mata pencaharian utama penduduknya adalah nelayan dan petani serta pekerja rantauan di Malaysia dan Singapura. Orang Bawean ada pula yang menetap di Australia dan Vietnam

